

RENCANA KERJA



DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Menyusun Rencana Kerja (RENJA) perubahan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini memuat program dan kegiatan, alokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini Kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Bekasi, 22 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan



Zeno Bachsar, S.Si.T., M.Si.M,T
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19730211 199203 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan tuntutan yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik merupakan pengaruh globalisasi serta implikasi meningkatnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat. Dengan demikian menuntut perubahan paradigma dan pelayanan publik yang menghendaki adanya perilaku pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Begitu pula halnya dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang tidak terlepas dari tuntutan publik tersebut. Sebagai Dinas yang berada pada posisi dengan pertumbuhan cepat dan strategis, Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada masyarakat. Oleh karena itu Dinas Perhubungan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi dititikberatkan pada pelayanan publik dalam bidang transportasi jalan, yang merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, mendorong pertumbuhan kota melalui kegiatan jasa dan perdagangan. Pentingnya transportasi jalan ini tercermin pada semakin meningkatkan kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di Kota Bekasi.

Secara umum Dinas Perhubungan telah melaksanakan fungsi di atas, yaitu sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat dan juga

Pemerintah Kota Bekasi yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis di antara Dinas, Pemerintah, dan masyarakat Kota Bekasi. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik dari masyarakat maupun Pemerintah Kota Bekasi. Keberhasilan pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada pencapaian sasaran yang telah dicapai tiap tahunnya. Dalam melaksanakan kegiatan dan pengukuran kinerja kegiatan telah diidentifikasi secara lengkap dari input, output, dan outcome. Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi tentang sejauh mana tingkat kepuasan yang diterima oleh masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sebagai penutup, semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini bermanfaat bagi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang semakin baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL v

BAB PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum..... 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 4

 1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU 7

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun lalu dan
 Capaian Renstra Dinas Perhubungan..... 7

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan..... 27

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..... 34

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 37

 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 45

BAB TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN 47

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47

 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan 50

 3.3 Program dan Kegiatan Renja Dinas Perhubungan 52

BAB RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN 61

BAB PENUTUP..... 68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Bekasi.....	17
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.....	32
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bekasi	38
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	46
Tabel 3.1	Tujuan,Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024.....	51
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kota Bekasi.....	53
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.....	62

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana dan pengembangan Perhubungan.

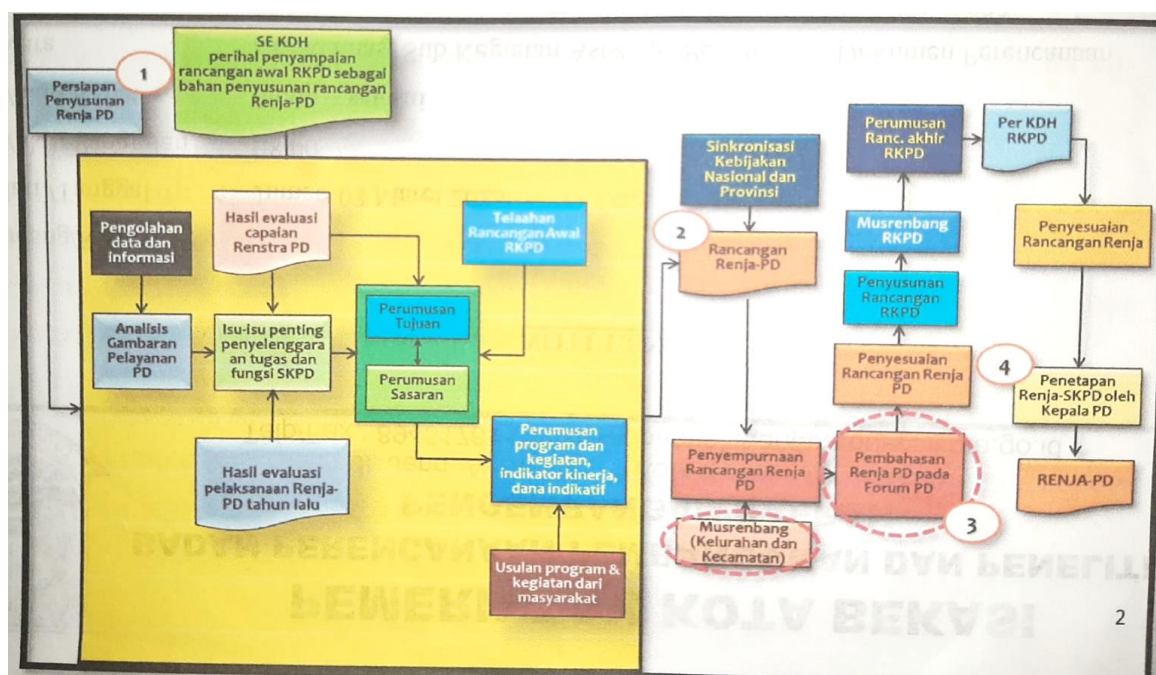
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang mempedomani Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 dan mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk periode tahun 2024 memuat program/kegiatan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dengan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia.

Proses penyusunan Renja dilakukan dalam rangkaian penyusunan RKPD sebagaimana berikut digambarkan keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1.1

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD (Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2024, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2024 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Perangkat Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 Dan Daerah Otonom Baru;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi

Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023;
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Bekasi;
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui gambaran umum tentang pembangunan Kota Bekasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2024.
- Mengetahui kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2024.
- Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 memiliki sistematika penulisan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

Bab II Menjelaskan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan perkiraan Capaian Tahun berjalan 2023 serta kaitannya dengan capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Di samping itu, pada Bab II diuraikan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD sertapenelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV Menjelaskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024

BAB V PENUTUP

Bab V Memuat kesimpulan dari rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan rekomendasi rencana tindak lanjut dari permasalahan yang ada.

BAB

2

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi perhubungan kepada masyarakat Kota Bekasi. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi dan penataan pelayanan yang memadai dari tahun ke tahun walaupun anggaran yang ada sangat terbatas namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Perhubungan, Renja juga merupakan redaksional alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kota Bekasi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan , keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Secara umum indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja tahunan adalah input, *output* dan *outcome* sementara *benefit* dan *impact* lebih digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pada jangka menengah dan jangka panjang.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumberdaya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2022 berdasarkan LKIP 2022 yang telah disusun menetapkan empat sasaran strategis, tujuh indikator kinerja, sembilan program dan tiga puluh delapan kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2022 secara umum dapat dicapai dengan cukup baik, Sampai akhir Desember 2022 pencapaian realisasi fisik sebesar 98% dan realisasi keuangan 93.83%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas

Indikator dan Target Sasaran :

- Persentase titik kemacetan yang teratasi, target sasaran 60% (5 titik) hasil yang dicapai 60% (5 titik) dengan capaian kinerja 100 %. Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 terdapat 24 titik/simpang kemacetan yang menjadi target penanganan dalam 5 (lima) tahun, untuk Tahun 2022 Target penanganan kemacetan sebanyak 5 titik/simpang yaitu : Simpang Cipendawa, Simpang Pertigaan Pondok Hijau, Simpang H.Masan, Simpang Kemang, Simpang Hankam. Dalam pelaksanaan penanganan tersebut tidak terdapat kendala atau permasalahan dan telah terlaksana sepenuhnya. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah Jumlah Titik Kemacetan yang tertangani di Kota Bekasi Tahun 2022 dibagi Jumlah titik kemacetan di Kota Bekasi dikali 100%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Indikator dan Target Sasaran :

- Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi dengan target sasaran 7,84 % dengan hasil capaian 7,84% dengan realisasi 100 %. Sarana dan Prasarana lalu lintas merupakan ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. Dalam hal untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas maka diperlukannya pengawasan kelaikan jalan terhadap sarana dan prasarana. Sehingga sarana dan prasarana yang tersedia adalah sarana prasarana perhubungan yang laik fungsi demi menjamin keselamatan pengguna jalan di Kota Bekasi. Terminal sebagai lokasi asal dan tujuan perjalanan memainkan peranan penting untuk pengaturan kendaraan umum. Luasan terminal yang memadai untuk keperluan sirkulasi, parkir, kedatangan dan fasilitas operasional baik utama maupun pendukung menjadi hal yang sangat yang diperlukan. Untuk melayani naik turunnya penumpang dan perpindahan intra dan / atau moda transportasi, Kota Bekasi saat ini memiliki 1 buah terminal induk dan 2 sub terminal. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan (terminal, halte dan rambu) dikali 100%.

Pada indikator Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi terdapat 5 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran yaitu Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), target BB hasil yang dicapai BB

Capaian Kinerja Pendapatan pada Tahun 2022 pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022.

Capaian Kinerja pendapatan tahun 2022 terhadap Renstra Tahun 2018 –2023 sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	OBJEK RETRIBUSI		TARGET	REALISASI	%
1	Pengujian kendaraan bermotor			Rp 4.455.227.052	Rp 5.469.960.400	123
		1	Mobil penumpang	Rp 75.152.945	Rp 75.447.000	100,39
		2	Mobil Bus	Rp 148.539.810	Rp 197.300.500	132,83
		3	Mobil Barang	Rp 4.231.534.297	Rp 5.197.212.900	122,82
2	Pemakaian Kekayaan daerah			Rp 140.602.400	Rp 144.216.000	102,57
	MCK terminal	1	Terminal Induk (Bekasi)	Rp 119.512.040	Rp 130.210.000	108,95
		2	Terminal Kayuringin	Rp 21.090.360	Rp 14.006.000	66,41
	PSU Terminal			Rp 350.000.000	Rp 212.885.257	60,82
		1	PSU Terminal Bekasi	Rp 275.000.000	Rp 183.777.607	66,83
		2	PSU Terminal Kayuringin	Rp 75.000.000	Rp 29.107.650	38,81
3	Terminal			Rp 1.053.919.000	Rp 1.066.239.000	101,17
		-	INDUK (BEKASI)	Rp 638.919.000	Rp 660.865.000	103,43
		1	AKAP/AKDP		Rp 187.750.000	
		2	AKAP/AKDP		Rp 18.516.000	
		3	BUS KOTA PATAS AC		Rp 16.960.000	
		4	BUS KOTA EKONOMI		Rp 11.919.000	
		5	ELF		Rp 35.708.000	
		6	TEMPAT USAHA		Rp 45.232.000	
		7	PARKIR INAP		Rp 135.570.000	
		8	ANGKOT		Rp 158.670.000	
		9	BUS PPD/TRANSJSKA RTA		-	
		10	AKAP JOYOMARTONO		Rp 45.500.000	
		11	BUS KOTA JR CONNEXION		Rp 5.040.000	

NO	JENIS RETRIBUSI	OBJEK RETRIBUSI		TARGET	REALISASI	%
		-	PONDOKGEDE	Rp 150.000.000	Rp 137.980.000	91,99
		1	ANGKOT		Rp 128.980.000	
		2	BUS AKAP PPD/ JR CONNEXTION		Rp 9.000.000	
		-	KAYURINGIN	Rp 265.000.000	Rp 267.394.000	100,9
		1	ANGKOT		Rp 102.028.000	
		2	BUS AKAP/DAMRI		Rp 113.020.000	
		3	TEMPAT USAHA		Rp 23.775.000	
		4	PARKIR INAP		Rp 4.425.000	
		5	TRANS JAKARTA		-	
		6	BUS KOTA NON EKONOMI		Rp 10.080.000	
		7	M. PNP PRIBADI (PU)		Rp 14.066.000	
4	Ijin Trayek			Rp 24.420.000	Rp 9.226.500	37,78
		1	Lintas Dalam Kota	Rp 17.655.000	Rp 3.640.000	
		2	Lintas Daerah	Rp 6.765.000	Rp 5.586.500	
5	Parkir Tepi Jalan			Rp 1.362.600.000	Rp 900.137.500	66,06
		1	MOTOR		Rp 455.160.000	
		2	MOBIL		Rp 389.365.000	
		3	TRUK		Rp 55.612.500	
JUMLAH KESELURUHAN :				Rp 7.386.768.452	Rp 7.802.664.657	105,63

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut secara keseluruhan capaian pemungutan retribusi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan target yang harus dicapai sebesar Rp. 7.386.768.452,- dan realisasi yang dicapai Dinas Perhubungan sebesar Rp. 7.802.664.657 ,- yaitu 105.63%.

2.1.2 Perkiraan Pencapaian Kinerja tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun kelima periode RPJMD 2018 – 2023 dan merupakan periode menilai keberhasilan kinerja SKPD dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Berbagai indikator pelayanan SKPD yang telah ditetapkan dalam renstra akan menjadi tolok ukur pencapaian fungsi pelayanan SKPD. Anggaran 2023 yang telah ditetapkan pada bulan Desember 2022 dan efektif berlaku januari 2023 saat ini telah berjalan memasuki triwulan Pertama dan SKPD telah menjalankan tupoksinya masing-masing.

Perkiraan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, SDM dan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja SKPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat direncanakan progres pelaksanaan sampai berakhirnya tahun anggaran.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Renstra 2018 – 2023 menetapkan empat sasaran strategis, tujuh indikator kinerja, sebelas program dan delapan puluh empat kegiatan. Dalam Renja tahun 2023 menetapkan tiga sasaran strategis, 3 indikator kinerja, dua program , empat belas kegiatan dan dua puluh Sembilan sub kegiatan.

Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2023 sesuai dengan penetapan kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas

Indikator 1: Persentase Peningkatan Titik Kemacetan yang Tertangani sebesar 80 % (6 titik) yaitu Simpang Tol Timur Jatimulya, Simpang Pasar Kecapi, Simpang Sawo, Simpang Stasiun Kranji, Simpang Sumir jalan hankam, Simpang Asem.

NO	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
I	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	91,7%
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	11,7%
1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Petugas Pengendalian Jaringan LLAJ di Kota Bekasi	100%
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan	100%

NO	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya Prasarana dan perlengkapan Jalan	100%
4	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersusunnya rencana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	100%
5	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Tersedianya Perlengkapan Pengendalian dan Penindakan Lalu Lintas	100%
6	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Simulasi Pengendalian/Pengaturan Lalu Lintas	100%
7	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Operasi Gabungan, Pengendalian dan Pengatur Lalu Lintas Dampak Penutupan Jalan di Wilayah Kota Bekasi, serta Monitoring dan Perhitungan Volume Lalu Lintas Kendaraan	100%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Indikator 2 : Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Perhubungan yang laik fungsi

NO	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
1	3	2	4
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	70%
		Persentase Peningkatan Fasilitas Penunjang Transportasi	100%
		Persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	80,5% (68.000 Kendaraan)

NO	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
1	3	2	4
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan operasional Transpatriot (Bantuan Subsidi)	100%
2	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	100%
3	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunya Kajian Park and Ride pada Kawasan TOD di Kawasan Bulan Bulan/PMI Kota Bekasi	100%
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terpeliharanya terminal di Kota Bekasi	100%
5	Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedinya Logistik Pengujian Kendaraan Bermotor	100%
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor	100%

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Indikator : Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

NO	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualiatas pelayanan Publik	100%
		Nilai Evaluasi AKIP	78,50
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%
4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas	100%
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Pelatihan pegawai	100%

NO	Program/sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Sub Kegiatan	Target
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kOmponen Listrik Kantor	100%
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terseidanya Bahan Logistik Kantor	100%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya jasa Penggandaan dan Percetakan kantor	100%
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tesedianya Bahan Bacaan Perundang-undangan	100%
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat rapat di luar kantor	100%
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip dinas	100%
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pemeliharaan Kendaraan dinas serta pajak kendaraan	100%
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan mesin kantor	100%
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor	100%

Berdasarkan uraian indikator kinerja beserta target pencapaian yang ditetapkan, diharapkan pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Bekasi dapat mencapai target kinerja sebesar seratus persen.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	1	201	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	15	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	15	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5832 Orang Bulan	1944 Orang Bulan	1944 Orang Bulan	1944 Orang Bulan	100%	1944 Orang Bulan	5832 Orang Bulan	100%
2	15	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 laporan	100%
2	15	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	15	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	-	2 Paket	67%
2	15	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100%	46 Orang	52 Orang	100%
2	15	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%
2	15	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	100%
2	15	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	9 Paket	100%
2	15	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	15	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	100%
2	15	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100%
2	15	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36Laporan	100%
2	15	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36Laporan	100%
2	15	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	15	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	22 Unit	66 Unit	100%
2	15	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	324 Unit	119.00 Unit	119.00 Unit	119.00 Unit	100%	86 Unit	324 Unit	100%
2	15	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	4 unit	100%
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	91,7%	85%	91%	91%	100%	91,7 %		-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	11.70%	2,26	10,60%	10,60%	100%	11,70%		-
						persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	85%	72.18%	78%	79,24%	101,59%	85%		-
						Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	70%	39.50%	60%	72,50%	120,83%	70%		-
						Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	100#	40%	60%	60%	100%	100%		-
2	15	2	201		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase penurunan permasalahan lalu lintas	100%	-	-	-	-	100%		-
2	15	2	201	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	36Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	100%
2	15	2	202		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentase peningkatan tingkat keselamatan jalan	100%	-	-	-	-	100%		-
2	15	2	202	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	45 Unit	15 Unit	15 unit	15 unit	100%	15 Unit	40 Unit	89%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	202	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	65 Unit	20 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	20 Unit	55 Unit	85%
2	15	2	202	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20 Unit	6 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	6 Unit	20 Unit	100%
2	15	2	203		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	persentase peningkatan pelayanan dibidang angkutan	100%	-	100%	-	-			-
2	15	2	203	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
2	15	2	204		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase peningkatan Pelayanan Perparkiran	100%	-	100%	-	-	100%	-	-
2	15	2	204	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 laporan	100%
2	15	2	205		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase peningkatan layanan pengujian kendaraan bermotor	100%	-	-	-	-	100%		-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	205	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	15Unit	3 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	7 Unit	15 Unit	100%
2	15	2	205	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	45.000 Unit	40.000 Unit	45.000 Unit	45.000 Unit	100%	45.000 Unit	45.000 Unit	100%
2	15	2	205	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	15	2	205	2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	19 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	19 Unit	100%
2	15	2	206		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan ketertiban kelancaran keamanan dan keselamatan lalu lintas	100%	-	-	-	-	100%		-
2	15	2	206	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Lapr	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 laporan	100%
2	15	2	206	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12 Unit	4 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	12 Unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	206	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 laporan	100%
2	15	2	208		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan									
2	15	2	208	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	1 Laporan	2 Laporan	87%
2	15	2	209		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pelayanan dibidang angkutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	2	209	5	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	27 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	27 Unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	2	209	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	2 Laporan	100%
2	15	2	210		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pelayanan dibidang angkutan	100%	-	-	-	-	100%	-	-
2	15	2	210	1	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	1 Laporan	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) indikator program dimana capaian indikator program terealisasi dengan baik.

Dari 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan anggarannya dialokasikan ke sub kegiatan lain yang lebih prioritas dalam pencapaian indikator program.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi diarahkan untuk mendukung serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Bekasi.

Banyak parameter yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kota Bekasi terdapat 4 jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi : (1) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan, (2) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Sungai dan Danau, (3) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Penyeberangan, dan (4) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Laut. Dari keempat jenis pelayanan dasar tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bekasi baru dapat melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan pada poin pertama.

Adapun capaian indikator pelayanan dasar angkutan jalan berdasarkan Permenhub tersebut diatas oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2022 dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Indikator SPM : “Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten”, dengan target SPM 75%.

Definisi operasional indikator SPM : “Prosentase jumlah jaringan jalan kota yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu kabupaten”.

Angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian, untuk menuju keberlanjutan angkutan umum memerlukan penanganan serius. Angkutan umum merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, tenaga kerja dan merupakan inti dari pergerakan ekonomi di kota. Berbagai bentuk moda angkutan umum diupayakan memiliki karakteristik dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada publik sehingga dapat mewarnai perkembangan system angkutan umum yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan agar dapat bersaing dengan angkutan pribadi.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 maka Capaian Kinerja Pelayanan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan mencapai 100% dimana jumlah jaringan jalan diKota Bekasi yang telah terlayani oleh angkutan umum.

Tersedianya Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

- Indikator SPM “Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek”, dengan target SPM 100%.

Definisi operasional indikator SPM : “Prosentase tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte pada suatu kabupaten”. Halte merupakan tempat kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan. Jumlah halte di kota Bekasi sudah tersedia untuk pelayanan angkutan umum. Capaian Kinerja ketersediaan halte dalam jaringan trayek kabupaten yang dilayani oleh angkutan umum sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%

- Indikator SPM “Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek”, dengan target SPM (40%)

Definisi operasional indikator SPM : “Prosentase jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan”.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Pada Kota Bekasi terdapat 2 jenis terminal, yaitu : (1)

Terminal type B (yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan) dan (2) Terminal type C (yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan). Jumlah terminal terminal type C sebanyak 2 unit (Terminal Bekasi dan Terminal Kayuringin) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Fungsi masing – masing terminal tersebut adalah :

- Terminal Bekasi untuk melayani jaringan AKAP, AKDP dan jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Kota Bekasi.
- Terminal Kayuringin untuk melayani jaringan AKDP (Bekasi – Jakarta) dan jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Bekasi bagian Barat.
- Terminal Pondok Gede untuk melayani jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Bekasi bagian Barat.
- Terminal Taman Harapan Baru untuk melayani jaringan angkutan kota dan/atau pedesaan wilayah Bekasi bagian Utara.

Sampai dengan tahun 2022 Capaian Kinerja Pelayanan ketersediaan terminal angkutan penumpang sebesar 100 %.

b. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan

- Indikator SPM “Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota”, dengan target SPM 60%

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten/Kota”.

Sesuai dengan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 mewajibkan jalan untuk dilengkapi dengan rambu, marka dan alat pemberi isyarat, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Sarana perlengkapan jalan tersebut dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pemakai jalan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 maka Capaian kinerja pelayanan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun

2022 sudah mencapai 100% dari target SPM Perhubungan sebesar 60%. Capaian ini tidak memperhitungkan jumlah PJU yang terpasang di Kota Bekasi karena kewenangan pengelolaan PJU berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

c. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

- Indikator SPM “Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000(empat ribu) kendaraan wajib uji”, dengan target SPM 60%.

Definisi operasional indikator SPM : ”Prosentase jumlah kendaraan bermotor wajib uji pada kabupaten terhadap 4.000 unit kendaraan bermotor wajib uji dalam kabupaten”.

Keterangan : yang dimaksud dengan SPM unit pengujian kendaraan bermotor adalah seperangkat alat uji dasar.

Capaian kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2022 sebesar 100% dari jumlah total kendaraan wajib uji di Kota Bekasi pada tahun 2022 sebesar 68,197 unit.

Dari jumlah taman kendaraan wajib uji di Kota Bekasi yang ada tersebut telah dilayani oleh 1 unit pengujian kendaraan bermotor, yaitu : Pengujian Kendaraan Bermotor Bulak Kapal dan Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling.

d. Sumber Daya Manusia

- Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal”, dengan target SPM 50%

Jumlah SDM di bidang terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah terpenuhinya sesuai kebutuhan untuk 4 terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Capaian kinerja SDM bidang terminal sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

- Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor”, dengan target SPM 100%

Jumlah SDM bidang pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah terpenuhinya sesuai kebutuhan untuk pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Capaian kinerja SDM bidang pengujian kendaraan bermotor sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

- Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota”, dengan target SPM 40%

Jumlah SDM di bidang MRL dan evaluasi Andalalin, pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi sudah memenuhi kebutuhan SDM bidang tersebut. Capaian kinerja SDM bidang terminal sampai dengan tahun 2022 sebesar 62.5%.

- Indikator SPM “Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum”, dengan target SPM 100%.

Jumlah SDM di bidang pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi sudah memenuhi kebutuhan bidang tersebut. Capaian kinerja SDM bidang terminal sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Bekasi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	
2	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek		40%	40%	40%	40%	40%	100%	100%	100%	100%	
3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan(rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	Fasilitas Perlengkapan Jalan	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	
4	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	
5	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal	Sumber Daya Manusia	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang andalalin, pengelolaan parkir pada kab/kota		40%	40%	40%	40%	40%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kab/kota	Keselamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar.

a. Kekuatan

1. Komitmen aparaturnya Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
2. Adanya Tugas Pokok dan fungsi yang jelas;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai;
4. Adanya rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ dan terminal;
5. Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor dan peralatannya.

b. Kelemahan

1. Sebaran SDM/tenaga teknis yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas;
2. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan transportasi, kelalulintasan, teknik mesin, serta yang memiliki kemampuan IT diatas rata-rata;
3. Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi.

c. Peluang

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani Wilayah Kota Bekasi;
2. Letak geografis Kota Bekasi yang strategis karena sebagai penyangga Ibukota Jakarta;
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan;
4. Adanya dukungan dari pemerintah pusat, Provinsi dan *Stakeholder* lainnya;
5. Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi.

d. Tantangan

1. Belum terlaksananya rencana umum transportasi perkotaan yang baik;
2. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai akibat mudahnya memperoleh fasilitas kredit dan menurunnya

kualitas, kuantitas sarana dan prasarana transportasi publik yang berdampak munculnya daerah rawan kemacetan;

3. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang di indikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain;
4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola transportasi perkotaan;
5. Adanya potensi bidang perhubungan yang belum tergarap secara maksimal.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Dari hasil identifikasi diatas, maka dirumuskan permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Beberapa permasalahan di bidang perhubungan adalah :

1. Kemacetan lalu lintas faktor yang mempengaruhinya adalah belum tercapainya standar pelayanan minimal untuk Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas/MRLL, Evaluasi Analisa dampak lalu lintas/andalalin, pengelolaan parkir pada kab/kota, tingkat jaringan jalan (LOS) yang rendah masih terdapat 24 titik kemacetan.
2. Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah belum tercapainya indikator kinerja utama untuk Persentase pelayanan angkutan yang baik, kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi.
3. Jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang.
4. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan lalu lintas secara menyeluruh, adapun faktor yang

mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.

5. Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
6. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

2.3.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan yang telah dilakukan dan identifikasi masalah yang ada, ditetapkan isu-isu strategis pemerintahan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhinya tingkat pelayanan jalan (LOS) cukup rendah masih terdapat 24 titik kemacetan, tidak seimbang pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan, fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya sudah lama sehingga memerlukan perbaikan / penggantian, Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar, peningkatan aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan, kurangnya SDM MRL.
2. Belum optimalnya angkutan umum dan massal, faktor yang mempengaruhi fasilitas pendukung transportasi (terminal, halte) yang perlu penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi, keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai serta belum adanya aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan angkutan umum massal. Hal ini juga ditunjukkan dengan belum

tercapainya indikator pada SDGs yaitu persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan

Dalam menyikapi isu-isu diatas Dinas Perhubungan Kota Bekasi menempuh beberapa hal diantaranya yaitu meningkatkan kinerja aparatur melalui bimtek/diklat, membangun sarana dan prasarana perhubungan, melakukan penataan fasilitas lalu lintas, meningkatkan pengendalian dan pengawasan lalu lintas serta perparkiran dan dengan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Dishub melalui penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan digitalisasi berdasarkan isu strategis.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi perlu dilakukan sinkronisasi dengan rancangan awal rencana kerja pemerintah Kota sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk di ajukan menjadi rencana kerja.

Berikut Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bekasi :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bekasi

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				54.972.674.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				54.972.674.000	
			Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%				Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%		
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%				Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	30.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	30.000.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	30.000.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	26.752.674.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	26.752.674.000	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,506 Orang	26.722.674.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,506 Orang	26.722.674.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	840.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	840.000.000	
4	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	720.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kota Bekasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	720.000.000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 Orang	120.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 Orang	120.000.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.150.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.150.000.000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	500.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	500.000.000	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bekasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	50.000.000	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1.100.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1.100.000.000	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	200.000.000	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dukumen	50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dukumen	50.000.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.000.000	
13	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)a SKPD	1 Laporan	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)a SKPD	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	1 Laporan	50.000.000	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	24.150.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	24.150.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	650.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	650.000.000	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	23.500.000.000	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	100 %	1.050.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	100 %	1.050.000.000	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	150.000.000	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	900.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 Unit	900.000.000	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	100.000.000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				92.678.335.492	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		92.678.335.492	
			Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	92%				Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	92%		
			Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	12%				Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	12%		
			Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	70%				Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	70%		
			Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	72%				Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	72%		
			Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	69.000 Kendaraan				Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	69.000 Kendaraan		
VII	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Rencana Jaringan Jalan LLAJ di Kota Bekasi	100 %	42.866.442.932	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Rencana Jaringan Jalan LLAJ di Kota Bekasi	100 %	42.866.442.932	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	500.000.000	
21	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12 Laporan	42.366.442.932	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12 Laporan	42.366.442.932	
VIII	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	100 %	10.400.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	100 %	10.400.000.000	
22	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	200.000.000	
23	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	52 Unit	5.000.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	52 Unit	5.000.000.000	
24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Bekasi	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20 Unit	200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Bekasi	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	20 Unit	200.000.000	
25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	40 Unit	5.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	40 Unit	5.000.000.000	
IX	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal	100 %	200.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal	100 %	200.000.000	
26	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Bekasi	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Bekasi	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	200.000.000	
X	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Parkir	100 %	1.674.768.600	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Parkir	100 %	1.674.768.600	
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	674.768.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	674.768.600	
28	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.000.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.000.000.000	
XI	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kendaraan yang laik jalan	100 %	13.847.123.960	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Persentase Kendaraan yang laik jalan	100 %	13.847.123.960	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	30 Unit	10.433.623.960	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	30 Unit	10.433.623.960	
30	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	60.000 Unit	1.437.500.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	60.000 Unit	1.437.500.000	
31	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dukumen	450.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dukumen	450.000.000	
32	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	200.000.000	
33	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	326.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	326.000.000	
34	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 Laporan	200.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 Laporan	200.000.000	
35	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	200.000.000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	200.000.000	
36	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan	1 Laporan	200.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan	1 Laporan	200.000.000	
	Kendaraan Bermotor		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kendaraan Bermotor		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
37	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	200.000.000	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	200.000.000	
38	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan	1 Laporan	200.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan	1 Laporan	200.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bermotor					Bermotor			
XII	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %	7.800.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota		Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %	7.800.000.000	
39	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	450.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	450.000.000	
40	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Bekasi	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5 Unit	4.850.000.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Bekasi	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5 Unit	4.850.000.000	
41	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2.500.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2.500.000.000	
XIII	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Lalu Lintas	100 %	300.000.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Lalu Lintas	100 %	300.000.000	
42	Pelaksanaan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pegemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	300.000.000	Pelaksanaan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pegemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	300.000.000	
XIV	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Umum Massal	100 %	15.440.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Umum Massal	100 %	15.440.000.000	
43	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	14.940.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Bekasi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	14.940.000.000	
44	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	500.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	500.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XV	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelayanan Angkutan Perkotaan	100%	150.000.000	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelayanan Angkutan Perkotaan	100%	150.000.000	
45	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	150.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	150.000.000	
					147.651.009.492					147.651.009.492	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “*top down & bottom up*”. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Bekasi untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan OPD.

Diantaranya ke ikut sertaan masyarakat dalam pembangunan tersebut adalah dengan diadakannya Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan membantu pemerintah dalam merumuskan arah dan kebijakan pembangunan.

Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut, maka Dinas Perhubungan telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberi rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukan ke dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan

Berikut Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA				
	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	RT.3 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok Gede, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit	
		RT.5 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok Gede, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	
		RT.10 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok Gede, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	
		RT.4,9,7,10,11 RW.14 Kel.Jatiwaringin Kec.Pondok Gede, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Unit	
		RW 021 Kav. PGRI Kel.Pejuang Kec.Medan Satria, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Unit	
		Pengadaan Cermin Cembung Tikungan Jalan Rt 01 Rw 01 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede (Puspa Yani, H. Marullah), Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	
		Pengadaan Cermin Cembung Jalan Rw 04 Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	
		Pengadaan Cermin Cembung Jalan Rw 08 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategis juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan.

Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembanguan pada Unit Kerja Eselon I. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari Rencana Strategi Kementerian Perhubungan Tahun Tahun 2020-2024.

Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dikelompokan menjadi 3 aspek :

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan Keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
KEPALA BAPPELITBANGDA	
KABAG HUKUM	

menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
- b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
- c. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
- d. Meningkatkan Kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*.
- e. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
- f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
- g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan *clean governance*.

3. Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran :

- a. Meningkatkan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi antarmoda, multimoda, transportasi massal dan TOD (*Transit Oriented Development*)
- b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang
- c. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan,terluar, terpecil dan khususnya di wilayah timur Indonesia
- d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.
- e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Dalam pencapaian dan pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang dikelompokkan menjadi 3 aspek tersebut Dinas Perhubungan Kota Bekasi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Dinas yang meliputi penindakan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), pembinaan keselamatan lalu lintas serta pengendalian lalu lintas

2. Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi prasarana transportasi, pengujian prasarana dan bina perpajakan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
3. Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan pembinaan terminal untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya

Selain dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional, dilakukan juga penelaahan terhadap tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2024-2026.

Tujuan Pembangunan Daerah Kota Bekasi terdiri dari 5 (lima) Tujuan yang terdiri dari:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis, inovatif dan akuntabel.
2. Terwujudnya pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas secara berkeadilan.
3. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur kota dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang tertib dan aman.
5. Terwujudnya ketahanan struktur perekonomian masyarakat kota

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan melaksanakan tujuan ke 1 (satu) **“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis, inovatif dan akuntabel”** dengan sasaran **“Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja pemerintah”**, dan tujuan ke 3 (tiga) **“Terwujudnya ketersediaan infrastruktur kota dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan”** dengan sasaran **“Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan”**.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai yang diinginkan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Tujuan diatas akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan merumuskan tujuan, yang mana tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna dapat memecahkan masalah dan menangani isu - isu strategis yang ada.

Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang perhubungan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan keselamatan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel

A. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah :

➤ **Sasaran untuk tujuan 1 adalah :**

1. Meningkatnya penanganan kemacetan lalu lintas;
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan

➤ **Sasaran untuk tujuan 2 adalah** Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran Dinas Perhubungan yang merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan,Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perhubungan Kota
Bekasi Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran		Target Kinerja Sasaran Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	Mewujudkan keselamatan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan				
		Meningkatnya Penanganan kemacetan lalu lintas	1	Persentase peningkatan titik Kemacetan yang tertangani	80%
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	2	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	9%
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntable				
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	3	Nilai Evaluasi AKIP	78,50

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan, 2024-2026

3.3 Program dan Kegiatan Renja Dinas Perhubungan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu berdasarkan isu-isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2024, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi diarahkan pada :

1. Pelayanan Publik dengan program/kegiatan pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran, pengadaan sarana dan prasarana kantor beserta pemeliharannya.
2. Peningkatan kelancaran lalu lintas dengan program/kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas, pengadaan fasilitas kelengkapan jalan, bimbuluh (diperuntukkan bagi pengemudi, pemilik angkutan dan siswa sekolah), dan pengendalian fasilitas parkir.
3. Peningkatan pelayanan angkutan dengan serangkain program/kegiatan pengembangan dan pemenuhan trayek untuk interkoneksi jaringan angkutan dan penyediaan sarana prasarana penunjang transportasi, Peningkatan keselamatan angkutan jalan dengan program/kegiatan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji .

Rencana Kerja Dinas Perhubungan untuk tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kota Bekasi

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				99.624.969.340				150.810.032.297
2	15	1	02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				48.103.499.480				
						Optimalisasi Disiplin Aparatur		100%				100%	
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%				100%	
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%				100%	
						Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%				100%	
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%	
2	15	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	100%	3.000.000	PAD		100%	30.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	5 Laporan	3.000.000	PAD		5 Laporan	30.000.000
2	15	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	25.889.393.000			100%	25.449.252.000
2	15	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	2506 Orang	25.886.393.000	PAD		2506 Orang	25.419.252.000
2	15	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	3.000.000	PAD		1 Laporan	30.000.000
2	15	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100 %	367.250.000			100%	650.000.000
2	15	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi	-	-	PAD		1 Paket	500.000.000
2	15	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	10 Orang	367.250.000	PAD		8 Orang	150.000.000
2	15	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100 %	1.121.040.000			100%	2.300.000.000
2	15	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	15.000.000	PAD		1 Paket	50.000.000
2	15	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	-	-	PAD		1 Paket	500.000.000
2	15	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bekasi	-	-	PAD		1 Paket	100.000.000
2	15	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Paket	826.000.000	PAD		1 Paket	1.200.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	85.040.000	PAD		1 Paket	200.000.000
2	15	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Dokumen	30.000.000	PAD		1 Dokumen	50.000.000
2	15	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	5 Laporan	160.000.000	PAD		1 Laporan	150.000.000
2	15	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1 Dokumen	5.000.000	PAD		1 Dokumen	50.000.000
2	15	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	100 %	19.398.816.480			100%	25.700.000.000
2	15	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	900.000.000	PAD			2.200.000.000
2	15	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	18.498.816.480	PAD		12 Laporan	23.500.000.000
2	15	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100 %	1.324.000.000			100%	1.750.000.000
2	15	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	8 Unit	200.000.000	PAD		9 Unit	250.000.000
2	15	2	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	150 Unit	474.000.000	PAD		156 Unit	1.200.000.000
2	15	3	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bekasi	86 Unit	50.000.000	PAD		50 Unit	100.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	4	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	1 Unit	600.000.000	PAD		2 Unit	200.000.000
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				51.521.469.860				89.455.387.838
						Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan		92%				92,50%	
						Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas		12%				13%	
						Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi		70%				85%	
						Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal		72%				75%	
						Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor		69.000				70.000	
2	15	2	02.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	100 %	29.786.548.320	PAD		100 %	Rp46.603.087.225
2	15	2	02.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	-	-				
2	15	2	02.01	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	12 Laporan	29.786.548.320	PAD		12 Laporan	46.603.087.225
2	15	2	02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	Kota Bekasi	100%	8.185.856.940	PAD		100%	12.400.000.000
2	15	2	02.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Bekasi	2 Unit	4.169.000.000			1 Unit	200.000.000
2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Bekasi	298 Unit	2.576.856.940	PAD		65 Unit	6.000.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	2	02.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Bekasi	20 Unit	440.000.000	PAD		20 Unit	200.000.000
2	15	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Bekasi	99 Unit	1.000.000.000	PAD		45 Unit	6.000.000.000
2	15	2	02.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Bekasi	100%	2.352.664.000			100%	9.900.000.000
2	15	2	02.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	873.662.000			2 Laporan	1.100.000.000
2	15	2	02.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Bekasi	5 Unit	1.005.052.000	PAD		6 Unit	6.000.000.000
2	15	2	02.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	473.950.000	PAD		2 Laporan	2.800.000.000
2	15	2	02.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Lalu Lintas	Kota Bekasi	100%	95.762.000	PAD		100%	400.000.000
2	15	2	02.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pegemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Laporan	95.762.000			1 Laporan	400.000.000
2	15	2	02.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Umum Massal	Kota Bekasi	100%	7.354.675.000			100%	14.504.644.293

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	2	02.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Bekasi	9 Unit	7.000.000.000			9 Unit n	14.304.644.293
2	15	2	02.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	354.675.000	PAD		2 Laporan	200.000.000
2	15	2	02.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Angkutan Perkotaan	Kota Bekasi	100%	-			100%	200.000.000
2	15	2	02.10	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Dokumen		PAD		2 Dokumen	200.000.000
2	15	2	02.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal	Kota Bekasi	100%	691.734.000			100%	691.734.000
2	15	2	02.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Bekasi	2 Unit	691.734.000	PAD		2 Unit	691.734.000
2	15	2	02.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Parkir	Kota Bekasi	100%	813.426.000	PAD		100%	1.809.722.320
2	15	2	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Laporan	813.426.000			1 Laporan	809.722.320

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	2	02.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	-	-	PAD		1 Laporan	1.000.000.000
2	15	2	02.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang laik jalan	Kota Bekasi	100%	2.240.803.600			100%	5.146.200.000
2	15	2	02.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Bekasi	9 Unit	194.203.600			30 Unit	1.350.000.000
2	15	2	02.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bekasi	-	-	PAD		10 Orang	200.000.000
2	15	2	02.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kota Bekasi	45.000 Unit	196.600.000	PAD		60.000 Unit	371.200.000
2	15	2	02.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	1 Dokumen	1.250.000.000	PAD		1 Dokumen	1.725.000.000
2	15	2	02.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	-	-	PAD		1 Laporan	200.000.000
2	15	2	02.05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Bekasi	-	-	PAD		1 Laporan	200.000.000
2	15	2	02.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Bekasi	19 Unit	400.000.000	PAD		9 Unit	500.000.000
2	15	2	02.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	1 Laporan	200.000.000	PAD		1 Laporan	200.000.000

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	15	2	02.05	9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	-	-	PAD		1 Laporan	200.000.000
2	15	2	02.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	-	-	PAD		1 Laporan	200.000.000

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Perhubungan telah menyusun rencana strategis dinas yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program sektor perhubungan.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan). Dalam ruang lingkup perencanaan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi yang bersifat makro dan mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota Bekasi secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian / sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua

pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara continued untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Program dan kegiatan tahun 2024, berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Perubahan Tahun 2024-2026 ini pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2024

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					99.624.969.340
2	15	1	02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				48.103.499.480	
						Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	3.000.000	
2	15	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	100%	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	5 Laporan	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
						Optimalisasi Disiplin Aparatur		100%	25.889.393.000	
2	15	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100%	25.889.393.000	
2	15	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	2506 Orang	25.886.393.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	1	02.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
						Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	367.250.000	
2	15	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100 %	367.250.000	
2	15	1	02.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	10 Orang	367.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
						Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	20.519.856.480	
2	15	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100 %	1.121.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Paket	826.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Paket	85.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Dokumen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	5 Laporan	160.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	1	02.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Kota Bekasi	1 Dokumen	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	100 %	19.398.816.480	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	900.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	18.498.816.480	PENDAPATAN ASLI DAERAH
						Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.324.000.000	
2	15	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Perangkat Daerah	Kota Bekasi	100 %	1.324.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	8 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
2	15	2	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	150 Unit	474.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	3	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bekasi	86 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	4	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	1 Unit	600.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				51.521.469.860	
						Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan		92%	37.972.405.260	
2	15	2	02.01		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Jaringan Jalan LLAJ di Kota Bekasi	Kota Bekasi	100 %	29.786.548.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.01	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	12 Laporan	29.786.548.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perlengkapan Jalan yang tersedia	Kota Bekasi	100%	8.185.856.940	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Bekasi	2 Unit	4.169.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Bekasi	298 Unit	2.576.856.940	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Bekasi	20 Unit	440.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Bekasi	99 Unit	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
						Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas		12%	2.448.426.000	
2	15	2	02.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Bekasi	100%	2.352.664.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	873.662.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
2	15	2	02.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Bekasi	5 Unit	1.005.052.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.06	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	473.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan Lalu Lintas	Kota Bekasi	100%	95.762.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.08	5	Pelaksanaan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pegemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Laporan	95.762.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
						Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal		72%	7.354.675.000	
2	15	2	02.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Umum Massal	Kota Bekasi	100%	7.354.675.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Bekasi	9 Unit	7.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	2 Laporan	354.675.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
						Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi		70%	1.505.160.000	
2	15	2	02.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal	Kota Bekasi	100%	691.734.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Kota Bekasi	2 Unit	691.734.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Penertiban Parkir	Kota Bekasi	100%	813.426.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	1 Laporan	813.426.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4	5	6	7
						Jumlah kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor		69.000	2.240.803.600	
2	15	2	02.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang laik jalan	Kota Bekasi	100%	2.240.803.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Bekasi	9 Unit	194.203.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kota Bekasi	45.000 Unit	196.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	1 Dokumen	1.250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Bekasi	19 Unit	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2	15	2	02.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Bekasi	1 Laporan	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH
					JUMLAH				99.624.969.340	

BAB

5

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

A. Kesimpulan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan upaya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.

Rencana Kerja tahun anggaran 2024 Dinas Perhubungan ada 2 Program, 14 kegiatan, 34 sub kegiatan dengan pagu Rp 99.624.969.340,- merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan dan pedoman bagi program kerja dan kegiatan serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2024. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi kedinasan.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Sinergi dan koordinasi yang efektif antar Bidang dan Sub Koordinator dalam pelaksanaan Kegiatan dalam Bidang Perhubungan di Kota Bekasi.
2. Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien sehingga mempunyai nilai kebermanfaatan yang tinggi kepada masyarakat pada bidang perhubungan di Kota Bekasi.
3. Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh perencanaan dan pengendalian yang cermat dan akurat.

Bekasi, 22 Agustus 2023
Kepala Dinas Perhubungan,



Zeno Bachtiar, S.Si.T., M.Si.M,T
Pembina Tk.IV.b
NIP. 19730211 199203 1 002